

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan aset penting bagi pembangunan negara. Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kesehatan dan gizi. Banyak anak di Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang terhambat karena disebabkan oleh kekurangan gizi atau biasa disebut *stunting*. *Stunting* juga dapat terjadi pada saat janin masih dalam kandungan akibat ketidakmampuan ibu untuk mengonsumsi protein yang cukup. Salah satu masalah gizi paling umum yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu kekurangan energi protein (KEP). Akibatnya, anak akan berkembang dengan tingkat pemikiran yang lebih lambat dan menjadi lebih pendek dari anak-anak pada umumnya sesuai dengan usianya (Aryo, 2020).

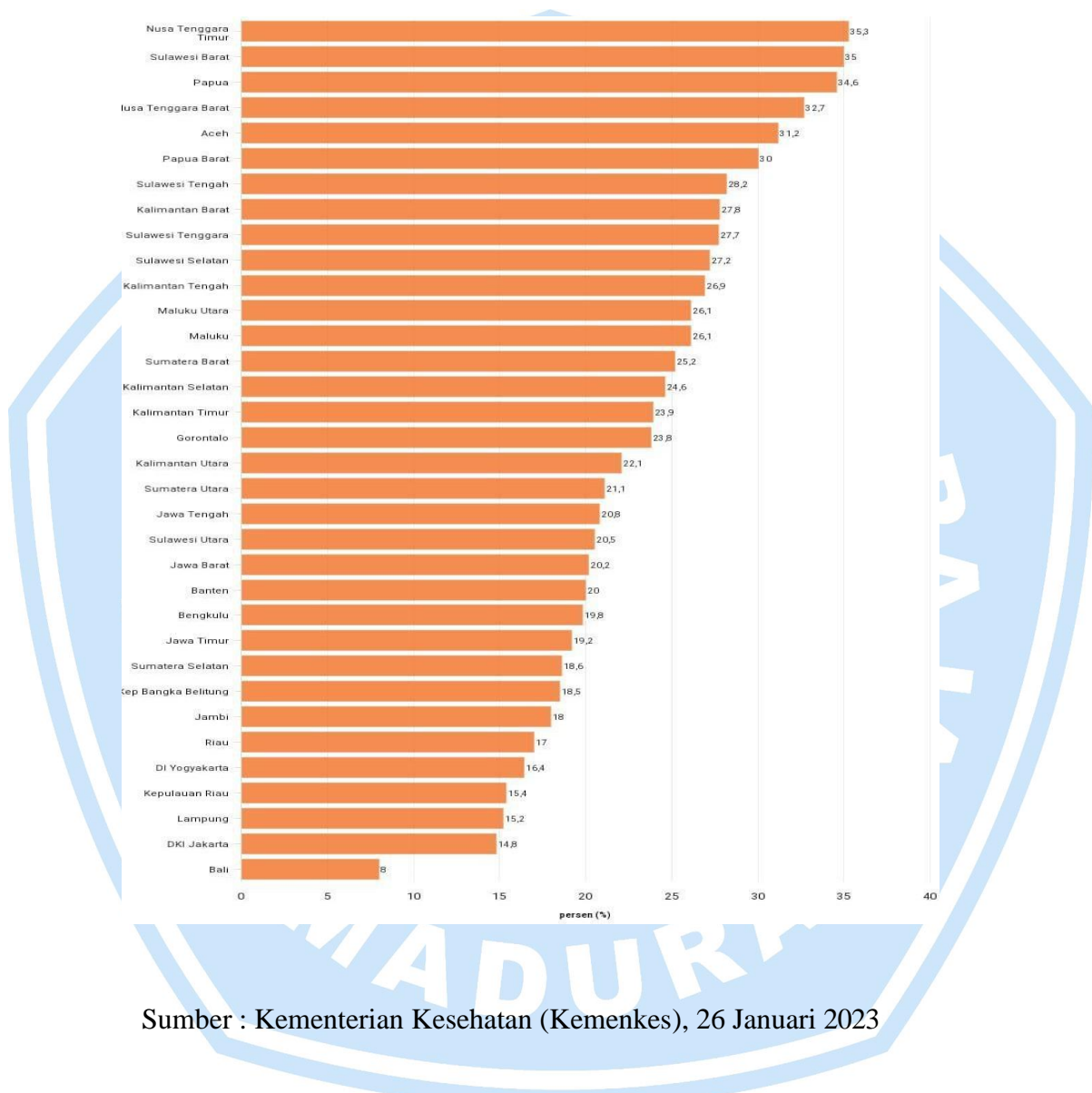
Ragam permasalahan, seperti kemiskinan, kurangnya pengetahuan, pola asuh anak, bencana alam, ketersediaan pangan yang rendah, dan pelayanan kesehatan yang terbatas, berasal dari kebijakan ekonomi dan politik suatu negara. Dampaknya melibatkan kekurangan zat gizi pada balita dan risiko penyakit infeksi (Rokom, 2023).

Stunting merupakan suatu keadaan terhambatnya pertumbuhan pada anak baik dari pertumbuhan tubuh maupun otak yang disebabkan oleh kurangnya gizi dalam waktu yang lama. Kurangnya gizi dalam waktu lama terjadi sejak janin dalam kandungan hingga awal kehidupan anak atau 1000 hari pertama kelahiran. *Stunting* memiliki potensi untuk memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas (Gustri Putri, 2023).

Di Indonesia prevalensi *stunting* berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, pada tahun 2022, prevalensi *stunting* pada balita mencapai 21,6%, mengalami penurunan sebesar 2,8 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini masih diatas standart WHO yaitu 20% maksimal prevalensi *stunting*. Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi angka *stunting* tertinggi di Indonesia dengan 35,3% dan Provinsi Bali dengan angka *stunting* terendah yaitu sebesar 8% (Annur, 2023a).

Gambar 1.1

Prevalensi Balita Stunting di Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2022



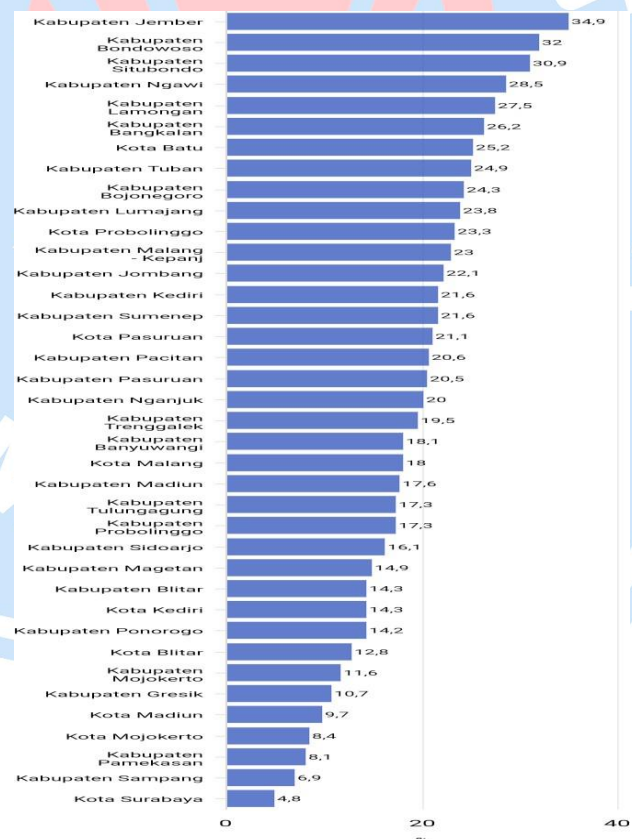
Sumber : Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 26 Januari 2023

Pada provinsi Jawa Timur, Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, pada tahun 2022, prevalensi *stunting* pada balita di Jawa Timur mencapai 19,2%, menunjukkan penurunan sebesar 4,3 poin dari tahun sebelumnya yang

mencatatkan angka 23,5% pada tahun 2021. Kabupaten Jember merupakan wilayah dengan prevalensi *stunting* tertinggi di Jawa Timur dengan angka 34,9%, dan kota Surabaya memiliki prevalensi *stunting* di Jawa Timur paling rendah yaitu 4,8%. Kabupaten Sumenep memiliki prevalensi *stunting* 21,6% dan berada pada nomor 15 prevalensi *stunting* di Jawa timur berdasarkan Kabupaten/Kota pada tahun 2022 (Annur, 2023b).

Gambar 1.2

Prevalensi Balita Stunting di Indonesia Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber : Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 26 Januari 2023

Kabupaten sumenep merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terletak diujung timur pulau madura. Kabupaten Sumenep memiliki kekayaan budaya, tradisi, dan wisata alam. Selain itu, Kabupaten Sumenep terkenal dengan bangunan bersejarah seperti Keraton Sumenep, yang merupakan istana kerajaan yang memiliki nilai historis dan arsitektur yang menarik. Dengan berbagai potensi alam dan budaya, Kabupaten Sumenep terus berkembang dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi, dalam penelitian (Unusa, 2023) Kabupaten Sumenep menghadapi persoalan dalam kemiskinan, serta kesehatan yang memiliki dampak terhadap *stunting*. Kasus balita kerdil di Sumenep disebabkan oleh berbagai faktor. Selain faktor ekonomi yang rendah, kurangnya kebersihan dan sanitasi, banyak orang tua balita yang kurang pemahaman tentang pentingnya asupan gizi seimbang yang diperlukan oleh bayi.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* Kabupaten Sumenep cukup tinggi yaitu pada tahun 2019 sebanyak 32,0%, tahun 2020 sebanyak 29,0%, tahun 2021 sebanyak 29,0%, dan tahun 2022 sebanyak 21,6%. Dengan prevalensi *stunting* tersebut dapat disimpulkan bahwa *stunting* di Kabupaten Sumenep masih tergolong tinggi dari prevalensi maksimal WHO yaitu 20% (Herdiyana, 2023).

Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Kesehatan,

Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep menargetkan penurunan angka kasus *stunting* di wilayah tersebut dari 21,6 persen menjadi 14 persen pada tahun ini. Target nasional pada tahun 2024 adalah penurunan angka *stunting* sebesar 14%, namun angka tersebut menjadi perhatian serius dan perlu dicapai pada tahun 2023 (Syahbana, 2023).

Pemerintah Kabupaten Sumenep berupaya untuk menuntaskan *stunting* dengan membentuk peraturan yang berupa Perbup Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penanggulangan *Stunting*. Dengan adanya peraturan yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten Sumenep sejak tahun 2019. Maka dari itu, perbup nomor 14 tahun 2019 tentang percepatan penanggulangan *stunting* dilakukan melalui 5 (lima) pilar sesuai dengan pasal 5 huruf (a) komitmen dan visi pimpinan daerah. (b) kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas. (c) konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat. (d) mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi. (e) pemantauan dan evaluasi (Sumenep et al., 2019).

Upaya pemerintah Kabupaten Sumenep juga sudah melakukan kegiatan inovatif. Bupati Sumenep Achmad Fauzi, melalui Dinkes P2KB, merancang Program GETTS untuk menerapkan dua strategi pencegahan terhadap *Stunting* dan TBC. Program kolaboratif ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi perempuan,

TNI, Polri, dan pemerintah desa. Harapannya, GETTS dapat berhasil mencegah dan mengurangi kasus TBC dan *Stunting* dengan melibatkan berbagai aspek, seperti gizi, kesehatan ibu dan anak, fasilitas kesehatan, sanitasi, akses air bersih, dan isu sosial ekonomi. Dalam pelaksanaan GETTS, Dinkes P2KB memberikan pendampingan kepada Bumil KEK dan Baduta serta membentuk Satgas Penting (Satuan Tugas Peduli *Stunting*) di setiap desa (Admin, 2022).

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penanggulangan *Stunting* Di Kabupaten Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan *Stunting* Di Kabupaten Sumenep ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Evaluasi Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan *Stunting* Di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi penelitian

selanjutnya, dan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu dan teori, terutama dalam disiplin ilmu Administrasi Publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan dan juga saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan percepatan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sumenep.
- b. Memberikan informasi dan pengetahuan tambahan kepada masyarakat terkait percepatan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sumenep.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini maka dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten yang dapat dikaji oleh penelitian dengan cara teratur dan sistematis. Sehingga sistematika penulisan ini telah dianggap sebagai kaitannya antara satu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Berisi tentang tinjauan pustaka dari mulai penelitian terdahulu, grand teori, serta teori pendukung.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta keabsahan data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Berisi tentang gambaran umum Kabupaten Sumenep, dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB V HASIL PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan saran.

